



**PERGERAKAN NAHDATUL ULAMA (NU) DARI ORGANISASI SOSIAL-
KEAGAMAAN KE ORGANISASI POLITIK TAHUN 1952-1973**

**KHOIRUN NIKMAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

khoirun.nikmah@iainponorogo.ac.id

Abstract: Nahdatul Ulama (NU) cannot be separated from Indonesian National History. The rapid development of NU cannot be separated from the role of kiai and Islamic boarding school students. NU in politics cannot be underestimated. In 1955 the NU Party was one of the winners of the election. The victory of the NU Party was repeated in 1971, winning the election after Golkar. However, the New Order government implemented a fusion policy that limited the existence of the Nu Party. From this incident, two problems emerged, namely 1) How did NU go from a religious organization to a political party? 2) How did the NU Party merge into the United Development Party (PPP)? The research method to be used is library research (literature review) with a qualitative-explorative approach. The conclusion of the results of this study is that the journey of the NU party brought extraordinary results with its winning achievements in the 1955 election. However, the NU party had to give up its existence because of a government regulation in 1973 implementing the fusion of political parties. The NU party must be willing to join the United Development Party (PPP). At that time NU's position in PPP was rarely heard by the government. NU figures in PPP were evicted from running for members of the DPR-RI. The fusion of political parties does not side with NU. Within Nu, conflicts often occur between NU clerics and politicians.

Keywords: *Movement, Organization, Social-Religious, Politics, NU 1952-1973.*

Abstrak: Nahdatul Ulama (NU) tidak dapat dipisahkan dengan Sejarah Nasional Indonesia. Perkembangan NU yang pesat tidak terlepas dari peran kiai dan santri pondok pesantren. NU dalam politik tidak dapat di pandang sebelah mata. Pada tahun 1955 Partai NU merupakan salah satu pemenang pemilu. Kemenangan Partai NU terulang pada tahun 1971, menjadi pemenang pemilu setelah Golkar. Namun pemerintah Orde baru melakukan kebijakan fusi membuat Partai Nu menjadi terbatas eksistensinya. Dari peristiwa tersebut maka muncul dua masalah yakni 1) Bagaimana perjalanan NU dari organisasi keagamaan menjadi Partai Politik? 2) Bagaimana perubahan Partai NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP)?. Metode penelitian yang akan digunakan adalah *library research* (tinjauan pustaka) dengan pendekatan kualitatif-eksploratif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Perjalanan Partai NU membawa hasil yang luar biasa dengan prestasi kemenangannya pada pemilu 1955. Puncak kemenagnagn NU pada pemilu 1971, mendulang suara cukup besar setelah Golkar. Namun partai NU harus merelakan eksistensinya karena peraturan pemerintah pada tahun 1973 menerapkan fusi partai politik. Partai NU harus rela bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada masa itu posisi NU di PPP jarang didengar aspirasinya oleh pemerintah. Tokoh NU di PPP digusur dari pencalonan anggota DPR-RI. Fusi partai politik tidak berpihak kepada NU. Dalam tubuh Nu sering terjadi konflik antara ulama dan politisi NU.

Kata Kunci: *Pergerakan, Organisasi, Sosial-Keagamaan, Politik, NU 1952-1937*

PENDAHULUAN

Kemunculan Nahdatul Ulama (NU) sebagai organisasi religius dan sosial, politik keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dengan peran kiai dan pesantren. Kharsima kyai sangat mewarnai perjalanan Nahdatul Ulama. NU oleh para pengamat dianggap sebagai organisasi tradisional sebagai antitesis kelompok modernis.¹ NU didirikan di Surabaya untuk menjawab dua tantangan besar pada masa itu. Tantangannya yakni globalisasi wahhabi, ketika Arab Saudi dikuasai oleh kelompok wahabi dan kedua pada saat dunia Islam banyak mengimpor ajaran-ajaran wahabi dalam bentuk pemurnian agama, dan salafiah dengan cara mereka masing-masing.²

NU berdiri sebagai bentuk reaksi dari luar terhadap gerakan pemurnian dan pembaharuan yang dilakukan oleh kelompok modernes yang dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Persis. NU tidak terlepas dai peran kyai dengan komunitas utama di pesantren dan masyarakat pedesaan yang menjadi penyangga utama kelompok Islam tradisonal.³ Organisasi NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang anggotanya tersebar dari Sabang-Merauke. Walaupun organisasi pendahulunya yaitu Muhammadiyah lebih dulu berdiri, tetapi NU tidak kalah pengikutnya pada perkembangan organisasinya. Nahdatul Ulama yang didrikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 .

NU mempunyai pengaruh besar di daerah Surabaya, Kediri dan Bojonegoro, selanjutnya di Kudus dan sekitarnya pada awal terbentuknya. NU juga turut aktif melawan sekutu Belanda pada awal perang kemerdekaan di Surabaya, NU mengirim pemuda-pemudanya untuk berjuang melawan sekutu di Surabaya. Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi

¹ Firdaus Muhammad, "DINAMIKA PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA," *KALAM* 10, No. 2 (February 23, 2017): 57, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.320>.

² Nur Khalik Ridwan. 2010. *.NU Dan Bangsa 1914-2010*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz) h. 41

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kiai* (Jakarta, 1983).

Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno.

Pasca pemberontakan PKI 1948, NU tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor. NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk kembali ke Khittah 1926 yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Sebagai partai Politik, NU merupakan salah satu partai yang mendulang suara terbanyak pada pemilu 1971 sebesar 18,7%. Pada masa pemerintahan orde baru, NU mulai menghadapi masalah. Pada 1973, pemerintah orde baru merampingkan dari sepuluh partai menjadi dua partai saja. Dua partai yakni partai aliran demokrasi dan partai aliran agama. Dengan kebijakan ini Partai Nu melebur ke tubuh Parta Persatuan Pembangunan (PPP).⁴

Setelah perampingan partai atau lebih dikenal dengan fusi partai politik, tokoh-tokoh NU tidak menempati posisi yang strategis dalam mengambil kebijakan. Tokoh-tokoh NU menempati majlis syuro. Beberapa tokoh NU disingkirkan dari pencalonan anggota DPR-RI, dan digantikan oleh calon yang bukan prioritas, sehingga terjadilah konflik internal dikalangan NU sendiri.⁵ Pergeseran pandangan gerakan NU menunjukkan kedewasaan elit NU dalam mengadaptasi setiap perubahan baik dalam politik keagamaannya, atau politik kenegaraan.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah *library research* (tinjauan pustaka) dengan pendekatan kualitatif-eksploratif. Sumber pustaka untuk bahan

⁴ Muhammad Eko Subagtio, "PERJALANAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1973-1984 Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan" 7, no. 2 (2019).

⁵ Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU* (Surabaya: Bisma Satu, 1999). h.356.

⁶ Muhammad, "DINAMIKA PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA."

kajian dalam penelitaian menggunakan buku teks dan jurnal. Buku-buku yang digunakan dalam tulisan ini seperti karya Choirul Anam dengan judul Pertumbuhan dan perkembangan NU, M.C Ricklefs dengan judul Sejarah Indonesia Modern, Nur Khalik ridwan dengan bukunya yang berjudul NU dan Bangsa Setelah sumber terkumpul kemudian dianalisis , diverivikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dari Organisasi NU ke Partai NU

NU didirikan karena adanya paham-paham Islam baru yang menurut tradisi NU tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Islam Indonesia. NU menurut kaum wahabi merupakan Islam yang kolot dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu dipilihlah kota Surabaya untuk mendirikan sebuah organisasi untuk menghindari masyarakat Islam di Indonesia dari paham baru yang kurang sesuai dengan tradisi. Nu disahkan oleh Gerdrink atas nama Gubernur Jendral Hindia Belanda, tertanggal 6 Februari 1930. Berarti selang 4 tahun sejak berdirinya NU di Surabaya Tahun 31 Januari 1926. Jadi setelah didirikan tahun 1926 baru diakui oleh pemerintah Belanda pada tahun 1930.⁷

NU salah satu organisasi terstruktur dan mempunyai pemimpin pemimpin NU. Nama-nama Rais Aam Syuriah dari tahun 1926-1980 yaitu Hasyim Asyari (1926-1947), KH Wahab Hasbullah (1947-1971), KH Bisri Syansuri (1971- 1980). Nama nama ketua Umum Tanfidziyah PBNU (1926-1984) yaitu H Hasan Gipo (1926-1929), KH Achmad Noor (1929-1937), KH Mahfudz Siddiq (1937-1942), KH Nachrowi Thohir (1942-1952), KH Wahid Hasyim (1952-1953), KH Masykur (1953-1954), KH Muhammad Dahlan (1954-1956), Dr. KH Idham Chalid (1956-1984).⁸

Kepengurusan NU mulanya bernama *Hoofdbestuur Nahdlatul Oelama* (HBNO). Kata *hoofdbestuur* (bahasa Belanda) berasal dari kata *hoofd* yang

⁷ M. Solahudin, *Nahkoda Nahdliyin* (Kediri: Pustaka Utama, 2013).h.1.

⁸ Solahudin. h. 3.

artinya kepala dan *bestuur* yang artinya pengurus. Istilah HBNO digunakan pada masa sebelum kemerdekaan, kemudian digunakan istilah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

Forum permusyawaratan tertinggi di dalam NU awalnya digunakan istilah kongres (ditulis *Congres*), yakni sejak kongres Nu ke 1 di Surabaya (1926). Pada masa awal-awal terlaksananya kongres pada saat itu sudah luar biasa, karena dimana-mana terjadi perang dan penjajahan. Minat peserta kongres sangat banyak, karena NU tidak hanya membicarakan soal agama saja tetapi masalah sosial dan ekonomi Indonesia. Selanjutnya digunakan istilah muktamar, yakni sejak muktamar NU ke 16 di Purwokerto (1946). Nahdatul Ulama merupakan organisasi yang terstruktur dan teroganisir dengan baik. Ini dibuktikan dengan terlaksananya kongres yang dalam perkembangannya disebut Muktamar.⁹

Kongres diadakan berturut turut setahun sekali. Kongres 1 diadakan di Surabaya (1926), kongres ke 2 diadakan lagi di Surabaya (1927), kongres ke 3 di Surabaya (1928), konggres ke 4 di Semarang (1929) , kongres ke 5 di Pekalongan (1930), Kongres ke 6 di Cirebon (1931), kongres ke 7 di Bandung (1932), konggres ke 8 di Jakarta (1933), konggres ke 9 di Banyuwangi (1934), kongres ke 10 di Solo (1935), kongres ke 11 di Kalimantan (1936), kongres ke 12 di Malang (1937), kongres ke 13 di Menes (1938), kongres ke 14 di Magelang (1939). Kongres ke 15 di Surabaya (1945).¹⁰

Nama Nahdlatul Ulama sendiri diusulkan oleh KH. Mas Alwi Abdul Aziz, sedangkan lambang NU dibuat oleh KH. Ridwan Abdullah. Kedua kiai ini berasal dari Surabaya. Arti lambang NU itu adalah, bahwa bola dunia mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, ikaatan tali menunjukkan bahwa kita harus memperkuat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, 99 untaian tali menunjukkan asmaul Husna, bintang besar menunjukkan nabi Mohammad dan bintang dua kiri kanan menunjukkan sahabat nabi yaitu Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman Bin affan dan ali bin Abi Tahlid,

⁹ Ridwan, *NU Dan Bangsa 1914-2010*.h. 51

¹⁰ Ridwan. h.6.

empat bintang dibawah menandakan 4 Mahzab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan 9 bintang ini juga bisa diartikan 9 wali yang berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan tulisan arab Nahdatul Ulama murni atas kreasi Kiai Ridwan. Kiai Ridwan mendapat inprasi lambang ini dari mimpinya.

Kantor NU pusat yang berada di Surabaya beberapa kali mengalami perpindahan. Awalnya di kampung Kertopaten kediaman Wahab Hasbullah, lalu pindah ke lawang Agung yang ada di jalan Sasak Surabaya, kemudian pindah ke Kampung bubutan Surabaya keiaman KH Ridwan Abullah. Ketika Kota Surabaya diduuki Belanda, kantor NU pindah ke Jalan Pengadangan Nomor 3 Pasuruan keiaman KH. Muhammad Dahlan. Selanjutnya setelah kota pasuruan diduduki Belanda kantor NU pindah ke Jalan Soetomo nomor 9 Madiun kediaman KH Mahfudz Efendi. Berikutnya pada masa Agresi militer II, kantor pusat NU kembali lagi ke kampung Bubutan Surabaya. Lalu pindah ke Jakarta di jalan Jawa no 112, kemudian pindah lagi ke jalan menteng raya no 22. Kemudian ke jalan Kramat Raya no 164 sejak KH Muhammad Dahlan sebagai ketua umum PBNU.¹¹

Perjalanan organisasi NU tidak sama mulusnya dengan tempat kantor NU, sering berpindah pindah karena kondisi Indonesia pada saat itu sering terjadi pemindahan kekuasaan antara Belanda, Jepang, Indonesia. Sehingga tidak mengherankan kalau kantor NU sering berpindah pindah dan kantornya berada disalah satu rumah pengurus atau ketua NU, karena dananya atau pemasukan organisasi kala itu juga masih minim.

NU mempunyai organisasi yang berada dibawahnya yang disebut badan Otonom seperti Muslimat yang melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU. Fatayat melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan. GP Ansor melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU, IPNU untuk pelajar putra, IPPNU untuk pelajar Putri. Sarbamusi untuk kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Pagar Nusa badan otonom NU yang melaksanakan pengembangan seni Bela diri dan pencak silat yang didirikan di Pondok Lirboyo, Kediri tanggal 3 Januari 1986.

¹¹ Solahudin, *Nahkoda Nahdliyin*.h.2.

Sebelum menjadi partai politik NU, kader-kader organisasi NU bergabung ke Majelis Syuro Muslimin (Masyumi). Banyak sumbangan pemikiran warga NU untuk partai Masyumi. Pada masa perjanjian Linggarjati Masyumi merupakan salah satu partai yang menolak isi perjanjian tersebut, selain Masyumi terdapat partai lain yang menolak isi perjanjian seperti PNI, Angkatan Komunis Muda (ACOMA), Partai Rakyat Jelata, Partai Rakyat Indonesia, Laskar rakyat Jawa Barat, Partai Wanita.¹²

Pada tahun 1950 NU mengadakan muktamar yang ke 18 di Jakarta yang memutuskan keluar dari masyumi, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan sambil mempersiapkan pendirian partai NU dan menunggu kesiapan orang-orang NU yang duduk di Masyumi.¹³

Terjadi perpecahan antara kaum muslim tradisional dan modernis ditubuh masyumi. Hal ini terjadi adanya perbedaan pendapat antara pihak modernis dengan pihak tradisional. Pihak modernis disini maksudnya orang-orang Masyumi sedangkan pihak tradisional maksudnya adalah Kiai NU. Untuk pertama kalinya jabatan menteri agama di berikan kepada pihak modernis dan bukannya kepada Wachid Hasyim. Antara bulan April- Agustus 1952, Nahdatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik sendiri yang dipimpin Wachid Hasyim.¹⁴

Karena perbedaan orientasi politik dan ketidakadilan dalam pembagian posisi politik, bahkan ideologi itulah NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri yang diputuskan dalam muktamar NU di Palembang pada Oktober 1952. Dalam Muktamar dihadiri oleh 234 utusan yang mewakili 86 dari 134 cabang Nu se-Indonesia. Dampak dari keputusan menjadi partai politik, jika sebelumnya hanya memfokuskan pada persoalan-persoalan sosial keagamaan, sejak muktamar

¹² Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid IV)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).h.212

¹³ Abdul Mun'im DZ, *Benturan NU PKI 1948-1965* (Depok: Langgar Swadaya, 2013).h.82.

¹⁴ M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi, 2008).h. 509.

tersebut NU menambahh kegiatannya di ranah politik. AD-ART tidak lagi berbentuk jami'yah tetapi menjadi AD-ART Partai Politik NU.¹⁵

Penarikan diri dari Masyumi bukan hanya disebabkan pendirian keras M Natsir di satu sisi dan KH Wahab Hasbullah di sisi lain ingin sama-sama bertahan. M Natsir tidak memberikan konsesi Kementerian agama kepada NU, dan KH Wahab Hasbullah tetap melihat NU yang besar tidak diberi konsesi kementerian negara, termasuk kementerian agama adalah suatu kekeliruan yang besar karena NU menyumbang besar dari sisi dukungan massa.¹⁶

Tujuan politik NU menjadi parpol kala itu yaitu penyaluran dana pemerintah terhadap NU, mendapatkan peluang bisnis, dan menduduki jabatan birokrasi. Sehingga NU menjadi terperosok kedalam kubangan yang dalam dan keluar dari Khittah NU 1926, tujuan politik seperti itu tampaknya justru menyebabkan NU terjerembab dalam kubangan orientasi politik materialistik, lalai pada politik kerakyatan. Bahkan NU dituduh sebagai oportunist. NU tidak menunjukkan prestasi yang gemilang bahkan bisa dikatakan gagal.¹⁷ NU mempunyai dua model politik yaitu kerakyatan dan kenegaraan. Namun NU tidak mampu mempertahankan dua model politik tersebut karena godaan politik kekuasaan baik ditokoh NU maupun dari luar NU. Walaupun pada dasarnya khittah NU tidak berpolitik, akibat tergiur oleh politik kekuasaan akhirnya NU membentuk parpol sendiri.

Padahal NU pada pemilu 1950 telah menyumbangkan suara masyarakatnya untuk masyumi. Hasil perolehan suara pada pemilu 1950 Masyumi mendapat 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 Kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai katolik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%).¹⁸ Jika dilihat dari perolehan suara pada tahun 1950 menempatkan Masyumi dalam kedudukan kursi yang terbanyak, tetapi sangat

¹⁵ Budi Sujati, "Dinamika Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 1955 di Jawa Barat," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (April 23, 2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6138>.

¹⁶ Ridwan, *NU Dan Bangsa 1914-2010*.h. 111.

¹⁷ Kompas, *Nahdatul Ulama-Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan* (Jakarta: Kompas, 2010).h.5.

¹⁸ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*.h.503.

disayangkan suara yang diperoleh masyumi dari NU tidak dibalas dengan pengangkatan Wachid hasyim sebagai menteri agama dari Masyumi. Hal ini memberikan kekecewaan yang besar pada NU sehingga mendirikan partai NU.

Tahun 24 Juni 1953 NU muncul menjadi kekuatan partai politik baru dikancah Nasional. Soekarno menunjuk tim formatur baru Mr. Wongsonegoro dan NU muncul sebagai kekuatan baru. Tetapi NU menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 karena keretakan di kabinet Ali Sastroamijoyo Jilid I.¹⁹

Memasuki pemilu 1955 mulai terjadi benturan langsung antara NU dan PKI, bermula saat PKI mendaftarkan tanda gambarnya pada Kementrian Dalam Negri yang menyebutkan PKI sebagai partai orang komunis dan orang-orang tidak berpartai. Hal ini ditentang oleh NU karena PKI berusaha mengklaim kelompok lain belum tentu PKI. Setelah berdebat dengan Ketua Partai NU Idham Chalid sebagai Ketua Umum partai NU dengan DN Aidit Sekjen CC-PKI yang dimoderatori oleh Menteri Dalam Negri R Soenarjoyang berasal dari NU, akhirnya PKI bisa dikalahkan.²⁰

Keteganganpun tidak hanya antara KH Idham Chalid dan DN Aidit tetapi awal tahun 1955 akan dimulainya pemilu 1955 terjadi ketegangan di desa-desa juga, ini disebabkan PKI memperluas wilayahnya untuk mendapatkan kursi terbanyak dalam pemilu. Hal ini menyebabkan ketegangan antara simpatisan PKI dan santri-santri NU yang berada di desa.²¹ Sehingga pada saat itu tahun 1955 bisa dilihat adanya ketegangan politik ditingkat desa secara tidak langsung antara kelompok kelompok PKI dengan para santri NU yang kebanyakan mereka bermukim di pedesaan. Masyarakat desa mudah dimasuki suatu paham jika pemimpin mereka sudah terkena paham tersebut. Contohnya PKI telah menggandeng para pemimpin desa untuk menyebarkan paham atau tujuan partai.

Pada tahun 1955 terjadi pemilu yang pertama di Indonesia. Hasil pemilu 1955 menunjukkan 6 partai besar politik yang mendapatkan 1 juta ke atas, yaitu

¹⁹ Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid IV)*.h.314.

²⁰ Mun'im DZ, *Benturan NU PKI 1948-1965*.h.82.

²¹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*.h.518.

PNI mendapatkan 8.434.653(23,32 persen dengan 57 kursi). Masyumi mendapatkan 7.903.886 (20,92 persen dengan 57 kursi), NU mendapatkan 6.955.141 (18,42 persen dengan 45 kursi), PKI mendapatkan 6.179.914 (16,36 persen dengan 39 kursi), PSII mendapatkan 1.091.160 (2,89 persen dengan 8 kursi).²² Pada tanggal 29 Spetember 1955 lebih dari 39 Juta rakyat Indonesia memberikan suaranya dengan hasil pemilu I dimenagkan 4 partai yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI. Dan partai lainnya memperoleh suara jauh lebih kecil daripada keempat partai tersebut.²³

Walaupun NU merupakan partai yang baru berdiri kurang dari lima tahun saat itu tetapi pendukungnya sangat banyak terhadap partai tersebut, menginagt sebelum menjadi partai politik NU adalah arganisasi keagamaan yang sudah mempunyai banyak anggota. Walaupun NU sudah keluar dari Masyumi tetapi partai Masyumi masih diatas NU perolehan suaranya.

Hasil pemilu di Jawa tengah antara PKI, NU dan PNI seimbang. Wakil-wakil hasil pemilu 1955 bersidang dalam konstituante yang berlarut larut dan kembali membicarakan dasar negara. Tahun 1956 Kabinet Burhanudin digantikan oleh kabinet Ali Sastroamijoyo. Kabinet tidak dapat lagi bertahan setelah NU menarik dukungannya pada awal bulan Maret. Ali Sastro Amijoyo sekali lagi membentuk sebuah kabinet(Maret 1956-Maret 1957). Dia bertekad membentuk koalisi PNI-Masyumi- NU, sehingga dia tidak perlu tergantung pada PKI.²⁴

Pada tanggal 20 Maret 1956 dibentuk Kabinet Ali II. Susunan kabinet koalisi ini terdiri dari PNI, Masyumi dan NU. PKI tidak dimasukkan dalam susunan kabinet ini menyebabkan Presiden Soekarno tidak menyetujuinya.. Presiden berusaha mendesak keinginannya kepada Sukiman dari Masyumi dan tokoh NU K.H Idham Chalid serta tokoh PNI dan PSII. Semua tokoh sependapat tetap menolak PKI masuk ke dalam kabinet Ali II.²⁵

²² Ricklefs, h.520.

²³ Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid IV)*.h. 317.

²⁴ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*.h.522.

²⁵ Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid IV)*.h. 321.

Jadi bisa dilihat dari sikap para pemimpin bangsa pada saat itu, NU adalah komposisi yang seimbang untuk membentuk kabinet yang harmonis, saat NU menarik diri dari kabinet Burhanudin, keseimbangan koalisi goyah sehingga Burhanudin memberikan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno. Sehingga Presiden Soekarno harus menunjuk kabinet baru untuk menjalankan pemerintahan sehingga ditunjuk kabinet Ali Sastroamijoyo jilid II untuk menyusun koalisi baru. Kabinet Ali tetap memasukkan NU sebagai koalisi dalam kabinetnya karena mengingat NU merupakan salah satu partai pendukung suara terbanyak.

Pada tahun 1957 saat Soekarno membuat suatu gagasan untuk Indonesia tentang demokrasi terpimpin banyak partai yang tidak setuju termasuk partai NU.²⁶ Pada masa demokrasi terpimpin tokoh NU yang diangkat sebagai wakil perdana menteri adalah Idham Chalid.²⁷ Meskipun demokrasi terpimpin kabinet non partai tetapi pada prakteknya terdapat koalisi antara NU dan PNI.

Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 Soekarno membuat sebuah kabinet baru dengan nama kabinet kerja. Tetapi NU tidak dimasukkan ke inti kabinet tetapi tokoh NU masuk ke dalam Menteri Agama.²⁸ Terjadi perdebatan alot sebelum disahkannya dekrit presiden, antara partai-partai besar termasuk NU. Pada bulan Juli 1959, Dewan Nasional dibubarkan dibentuk DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Masyumi dan PSI tidak terwakili di dalam kedua lembaga tersebut, PNI, PKI, NU dan partai lainnya terwakili di dalamnya.

NU menolak hasil dekrit presiden pada poin pembubaran DPR hasil pemilu. NU juga mengancam akan menarik tokoh-tokohnya jika hal itu terlaksana. Namun ini diurungkan, karena Soekarno mengiming-imingi penambahan kursi untuk partai NU. NU menolak duduk dalam satu kabinet dengan PKI dan menolak NASAKOM-nya Soekarno.²⁹

NU merupakan sebuah partai yang selalu ambil bagian pada masa itu, dan setiap keputusan NU selalu berpengaruh, hal ini dikarenakan pendukung Partai

²⁶ Notosusanto, h. 530.

²⁷ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, h. 537.

²⁸ Ricklefs, h. 522.

²⁹ Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid IV)*, h. 421.

NU sangatlah banyak. Sehingga tiap pergantian Kabinet NU selalu ikut andil. Karena Soekarno semakin berkuasa pada masa demokrasi terpimpin, dan pada saat itu ada 3 kekuatan partai besar yaitu, PNI (nasionalisme, NU (Agama), PKI untuk (komunis), sehingga Soekarno mendoktrin sebuah ajaran NASAKOM, yang terdiri dari 3 partai besar, yang menurutnya bisa disatukan di Indonesia. Walaupun pada saat itu PKI belum masuk dalam kursi kabinet.

Walaupun banyak tokoh NU yang tidak setuju adanya ajaran NASAKOM tetapi tetap saja presiden Soekarno merialisasikan NASAKOM. Dan PKI-lah yang sangat diuntungkan pada masa itu, sedangkan NU kalah suara terhadap dukungan PKI tentang ajaran NASAKOM, karena Aidit cenderung lebih dekat dengan Soekarno saat itu. PKI memanfaatkan sebaik baiknya tempat yang diberikan oleh presiden kepada partainya.³⁰

B. Dari Partai NU ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

NU mendapat jabatan strategis pada masa orde lama tetapi menjadi terpinggirkan ketika orde baru berkuasa, NU menjadi organisasi terpinggirkan. NU dituduh pernah memiliki hubungan mesra dengan Soekarno sehingga Orde baru memangkas akses politik NU. Departemen agama tidak lagi dihuni oleh aktifis NU. Seakan jalur politik Nu dibendung di semua daerah. Akibatnya, tidak hanya di departemen agama, di hampir semua wilayah politik NU juga termarjinalkan.

Keadaan demikian terjadi karena pada masa orde lama NU selalu mendukung semua hal kebijakan Presiden Soekarno sehingga pada masa Orde baru kekuatan politik NU harus dibatasi dengan menerapkan fusi partai politik sehingga ruang gerak NU terbatas. Padahal orde baru telah bekerja sama dengan para tokoh-tokoh NU untuk membersihkan para simpatisan PKI, tetapi kenyataannya orde baru mempunyai ketakutan terhadap kekuatan politik NU sehingga ruang geraknya tetap dibatasi dengan adanya fusi partai politik.

³⁰ Notosusanto.h. 425.

Pemfusiian partai politik menjadi tiga pada masa orde baru merupakan tujuan untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan Soeharto, karena mengaca pada sejarah jika terlalu banyak partai pada masa Soekarno akan sering terjadi gejolak politik. Pemerintah berkeinginan menggabungkan partai-partai peserta pemilu hanya menjadi tiga partai, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. DPR dibentuk berdasarkan 4 kelompok yaitu, angkatan bersenjata, GOLKAR, Golongan Pembangunan Demokrasi, dan golongan pembangunan persatuan. Partai Islam digabungkan dengan kelompok kedua dengan 94 kursi, semua partai non-Islam dengan jumlah 35 bergabung dengan kelompok pertama, dan Golkar sebagai mayoritas menjadi 231 kursi.³¹

Muktamar partai NU ke 25 diselenggarakan pada 1971 dengan keputusan menolak fusi. Akibat kebijakan pemerintah yang kuat dan menekan, muktamar NU akhirnya memberikan rekomendasi kepada PBNU untuk mengadakan perubahan-perubahan organisasi sesuai dengan kondisi objektif. Akhirnya fusi diterima dengan segala konsekuensinya. Secara formal PPP dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 dengan menggabungkan partai NU, PSII, Parmusi, dan Perti.

Ide fusi sebenarnya ditentang oleh banyak kalangan, termasuk bagian dari partai NU, tetapi pada Pemilu 1971 belum dapat dilaksanakan. Para deklarator partai ini ada lah KH Idham Chalid (Ketua PB NU), H Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)), Haji Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua umum Partai Islam (Perti)) dan Haji Masjkur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR).

KH Idham Chalid pada pemilu 1971 terpilih sebagai ketua DPR-RI dan MPR-RI sampai dengan tahun 1978. Dilihat dengan terpilihnya kader NU Idham Chalid menjadi anggota DPR dan MPR RI masa orde baru, menunjukkan eksistensinya NU dalam dunia politik Indonesia masa itu. Walaupun pendidikan

³¹ Ridwan, *NU Dan Bangsa 1914-2010*.h.225.

beliau tidak sampai perguruan tinggi hanya mondok di Pesantren Gontor, tetapi kemampuannya dalam berpolitik tidak diragukan lagi.³²

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didirikan ini berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah, tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan orde baru, PPP menggunakan asas PANCASILA sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak 1984. Salah satu misi PPP adalah berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah.

Struktur partai terdiri dari Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Kholid sebagai presiden Partai dengan wakil presiden Mintaredja SH, M Gobel, Rusli Halil dan KH Masjkur. Jabatan Presiden partai dalam perkembangannya dihapuskan dan hanya ada ketua umum. Dalam sejarahnya, ketua umum PPP pertama yang diangkat adalah MS Mintaredja (1973-1978).³³

Pemfusiaan yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru menimbulkan kecurigaan dikalangan para ulama dan kiai NU. Sehingga pada masa awal pemfusian partai, NU lebih meletakkan dirinya sebagai pihak oposisi pemerintah orde baru. Walaupun ada kiai NU yang sadar akan keuntungannya bergabung dengan pemerintah. Walaupun banyak orang NU yang curiga terhadap fusi partai politik menjadi 3 dengan partai NU berfusi ke PPP tetapi ada sebagian warga NU yang mematuhi aturan pemerintah.³⁴ Kebijakan fusi partai ini membawa konflik internal di PPP. Orde baru juga menekankan untuk semua partai politik menerapkan Pancasila sebagai asas partai politik.³⁵

³² Solahudin, *Nahkoda Nahdliyin*.h. 238.

³³ Ridwan, *NU Dan Bangsa 1914-2010*.h. 226.

³⁴ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*.h.627.

³⁵ Subagtio, "PERJALANAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1973-1984 Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan."

PENUTUP

NU merupakan organisasi yang awal berdirinya menekankan unsur keagamaan, sosial dan pendidikan. Namun kemudian NU ikut dalam kontsetasi poltik nasional. NU keluar dari Khittahnya tahun 1926 dan masuk ke dunia politik. Berdasarkan hasil Muktamar di Palembang, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan menjadi partai NU. Perjalanan Partai NU membawa hhasil yang luar biasa dengan prestasi kemenangannya pada pemilu 1955. Puncak kemenagnagn NU pada pemilu 1971, mendulang suara cukup besar setelah Golkar. Namun partai NU harus merelakan eksistensinya karena peraturan pemerintah pada tahun 1973 menerapkan fusi partai politik. Partai NU harus rela bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada masa itu posisi NU di PPP jarang didengar aspirasinya oleh pemerintah. Tokoh NU di PPP digusur dari pencalonan anggota DPR-RI. Fusi partai politik tidak berpihak kepada NU. Dalam tubuh Nu sering terjadi konflik anatra ulama dan politisi NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Choirul. *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bisma Satu, 1999.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kiai*. Jakarta, 1983.
- Kompas. *Nahdatul Ulama-Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Muhammad, Firdaus. "DINAMIKA PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA." *KALAM* 10, no. 2 (February 23, 2017): 57. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.320>.
- Mun'im DZ, Abdul. *Benturan NU PKI 1948-1965*. Depok: Langgar Swadaya, 2013.
- Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid IV)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2008.

Ridwan, Nur Khalik. *NU Dan Bangsa 1914-2010*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010.

Solahudin, M. *Nahkoda Nahdliyin*. Kediri: Pustaka Utama, 2013.

Subagtio, Muhammad Eko. "PERJALANAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1973-1984 Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan" 7, no. 2 (2019).

Sujati, Budi. "Dinamika Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 1955 di Jawa Barat." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, No. 1 (April 23, 2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6138>.